

ANGKATAN KERJA BERLEBIH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASIB TENAGA KERJA di INDONESIA



Oleh : E. Zainal Abidin *)

Meledaknya jumlah angkatan kerja telah melahirkan problem beruntun yang sangat krusial; kompetisi mencari peluang kerja menjadi amat ketat yang karenanya harga tenaga buruh menjadi sangat murah. Selanjutnya, para majikan lantas memandang remeh para buruh, dan yang terjadi kemudian adalah, tidak dihargainya kaum buruh sebagaimana mestinya, perlakuan tidak manusiawi dari majikan pun, terkadang harus disikapi secara kompromistis oleh buruh sekedar agar mereka tidak dipecat. Maka, menurut Zainal Abidin, untuk memperbaiki kondisi ini, HIP (Hubungan Industrial Pancasila) adalah sebuah alternatif yang harus direspon secara baik.

PENDAHULUAN

Hasil sensus penduduk Okotober 1990 menunjukkan jumlah penduduk yang semakin meningkat demikian pula penduduk usia kerja semakin bertambah, baik laki-laki maupun wanita. Jumlah penduduk yang semakin banyak tersebut membawa berbagai implikasi terhadap perluasan kesempatan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan serta pangan.

Peluang kerja, sejalan dengan pertumbuhan bidang ekonomi nasional sekitar 7 persen, semakin meningkat terutama di sektor perdagangan industri dan jasa. Akan tetapi masih tidak seimbang jika dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Terdapat ketimpangan antara penawaran dengan permintaan. Bagi mereka yang kurang beruntung terpaksa menjadi penganggur atau bekerja pada

*) HE. Zaenal Abidin, SH. MS. MPA. adalah staf pengajar FH. UII. Saat ini memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum UII.

bidang yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dengan tingkat upah yang kurang memadai.

Sementara itu jika dikaji dari sisi upah, kesejahteraan serta perlindungan keselamatan kerja, hubungan perburuhan yang terdapat di dalam praktek menunjukkan kesan masih adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ukuran kelayakan atau kepatutan.

Para pengamat demografi berpendapat masih merasa perlu melaksanakan kebijaksanaan pembangunan ekonomi khususnya perkembangan industri yang padat kerja dalam 2 dekade yang akan datang, peningkatan sumber daya manusia sejalan dengan makin meningkatnya tuntutan kualitas tenaga kerja, dan penyempurnaan hubungan perburuhan yang lebih memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja.

KONDISI DEMOGRAFI DI INDONESIA

Peluang terjadinya pertumbuhan penduduk di masa depan diperkirakan cukup besar. Kemungkinan tersebut terjadi terutama bila ditopang dengan pemantapan situasi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2010 maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1990 adalah 180,25 juta bertambah menjadi 196,55 juta pada tahun 1995 meningkat menjadi 214,28 juta pada tahun 2000, meningkat lagi menjadi 230,26 juta pada tahun 2005 dan menjadi 245,5 pada tahun 2010. Keadaan tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 1 tersebut di bawah ini.

Tabel 1.
Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 1990-2010

No.	Tahun	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	1990	89,89	90,36	180,25
2	1995	97,60	98,95	196,55
3	2000	106,80	107,28	214,08
4	2010	122,23	123,35	245,58

Sumber: *Tri Sucipto dan Tukiran, PPK, UGM, 1992.*

Jika dirinci lebih lanjut maka jumlah penduduk perempuan usia subut (15-49 tahun) sampai dengan tahun 2020 menunjukkan angka yang terus meningkat yaitu dari 45,67 juta pada tahun 1990 menjadi 51,39 juta pada tahun 1995 bertambah menjadi 56,99 juta pada tahun 2000 meningkat lagi menjadi 62,26 juta pada tahun 2005 dan menjadi 67,09 juta pada tahun 2010. Dengan demikian sasaran program Keluarga Berencana (KB) yaitu pengendalian fertilitas dimasa datang masih tetap besar.

Jika ditinjau dari kelompok umur, data sensus 1980 dan 1990 menunjukkan bahwa jumlah kelompok umur pemuda (15-29 tahun) baik di kota maupun di desa mengalami peningkatan secara proporsional yang cukup besar dari 10,4 juta pada tahun 1980 menjadi 18,2 juga pada tahun 1990 dengan laju pertumbuhan antara 5 sampai 7 persen per tahun. Dari angka-angka tersebut di atas dapat dibayangkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi penduduk umur pemuda (15-29 tahun) baik dibidang pendidikan, ekonomi maupun pekerjaan. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 tersebut dibawah ini.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Indonesia
Berdasar Umur 1980-1990

No.	Tahun	1980	1990	2000	2010
1	0 - 9	42,42	44,21	46,88	45,72
2	10 - 14	17,62	21,48	22,63	23,27
3	15 - 19	15,28	18,93	21,32	33,02
4	20 - 24	13,00	16,13	20,86	22,34
5	25 - 29	11,34	15,62	18,70	20,94
6	30 +	47,17	62,88	83,69	110,29

Sumber: Lukman Sutrisno, SP. 1980, 1990 diolah PPT-LIPI 1993 dan Tri Sucipto, PPK UGM 1992.

Berdasar asumsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 1990 adalah 72 juta bertambah menjadi 94 juta pada tahun 2000 dan menjadi 116 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2000 TPAK laki-laki diperkirakan sebesar 72 persen dan bertambah menjadi 73 persen pada tahun 2010. TPAK wanita pada tahun 2000 diperkirakan sebesar 40 persen dan bertambah menjadi 43 persen pada tahun 2010.

Dari angka-angka tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan kesempatan kerja masih cukup tinggi sehingga pembangunan di bidang ekonomi khususnya industri yang mampu menyerap tenaga kerja masih harus terus ditingkatkan. Terdapat sedikit kelainan pada kelompok usia kerja laki-laki usia 10-14, 15-19 dan 65 tahun ke atas mengalami penurunan berdasar asumsi pada usia tersebut terjadi pergeseran partisipasi dari pekerjaan ke pendidikan serta perbaikan dana pensiun.

Perkembangan proyeksi angkatan kerja sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel 3 tersebut di bawah ini.

Tabel 3.
Proyeksi Angkatan Kerja
Tahun 1990-2010

No.	Tahun	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	1990	46,84	25,14	71,98
2	2000	59,62	33,44	93,66
3	2010	72,87	43,20	116,97

Sumber: Tri Sucipto dan Tukiran, PPK, UGM, 1992.

LAPANGAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA

Sebagaimana dikemukakan oleh McDonald (1983) meningkatnya ketidaksesuaian antara penawaran (supply) dengan permintaan (demand) tenaga kerja seperti tergambar pada data sensus 1980 dan 1990 merupakan akibat tidak kongruennya antara transisi demografis (angkatan kerja yang semakin meningkat) dengan transformasi struktur ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1970-an. Salah satu gejala yang muncul dari disparitas itu adalah meningkatnya jumlah penganggur dan atau bagi mereka yang sudah bekerja terdapat ketidakcocokan (mismatch) antara tingkat dan kualitas pendidikan dengan status, jenis maupun lapangan pekerjaan yang dilakukan (Lukman, 1992: 4).

Lapangan usaha/pekerjaan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi di tempat mana seseorang bekerja meliputi 10 kelompok yaitu:

1. Sektor A, terdiri dari pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.
2. Sektor M, terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan.
3. Sektor S, terdiri dari perdagangan dan

komunikasi, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi dan usaha persewaan, jasa kemasyarakatan, sosial, perseorangan dan lainnya.

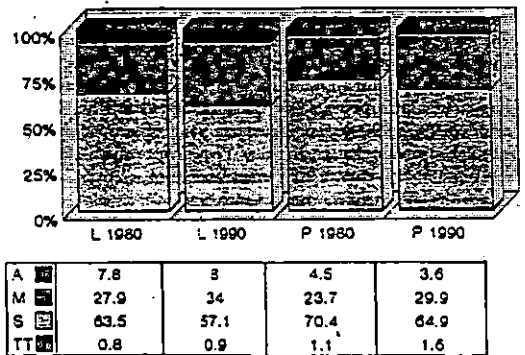
Hasil penelitian Lukman di beberapa perkotaan (1992) memperlihatkan lapangan usaha utama pemuda proporsi terbesar terserap di sektor S (jasa). Keadaan ini membuktikan bahwa pada umumnya kesempatan kerja yang terbuka untuk pemuda di perkotaan adalah sektor S (pekerjaan non kantor). Sektor ini mampu menampung tenaga kerja dari semua kalangan dan kurang memperhatikan kualitas pendidikan maupun umum seperti di sektor perdagangan dan jasa perseorangan, pemerintahan, keuangan, asuransi, hotel dan komunikasi. Sepertiga pemuda terserap pada sektor M (pertambangan dan industri) dan yang paling rendah di sektor A (pertanian).

Selama dekade 1980-1990 pada sektor S terjadi peningkatan jumlah absolut dari 1.387.783 orang menjadi 2.124.176 atau secara relatif dari 34 persen menjadi 28 persen sementara pada sektor M terserap sekitar 19 persen pada tahun 1980 menjadi 25 persen pada tahun 1990. Pada sektor perdagangan misalnya pada kurun waktu 10 tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,4 persen. Ini berarti sektor perdagangan masih cukup mampu menyerap menunjukkan jumlah yang lebih tinggi daripada laki-laki pada sektor kemasyarakatan dan perdagangan sebagaimana dibuktikan oleh hasil penelitian Moir, dkk. (1977), Thurstern (1986), Widarti (1984), dan Daliyo (1991).

Di sektor M menunjukkan keadaan sebaliknya dengan di sektor S dimana proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan khususnya di sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air serta bangunan. Di sektor industri pengolahan sebaliknya proporsi wanita lebih tinggi dibanding-

kan dengan laki-laki bahkan lebih dapat diandalkan. Berbagai investasi di perkotaan banyak menciptakan kesempatan kerja di bidang industri pengolahan yang lebih sesuai bagi wanita misalnya elektronik, tekstil, rokok, konveksi, pengolahan ikan, farmasi, industri jamu dan lain-lain. Pada gambar 1 dapat dilihat proporsi tenaga kerja laki-laki dan perempuan di sektor A, M dan S.

Gambar 1
Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Usia 15-29



Sementara itu menurut perkiraan kesempatan kerja selama akhir Repelita V penyerapan tenaga kerja masih bertumpu pada 4 sektor utama yaitu pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian diperkirakan telah menyerap 38,9 juta orang atau 49,5 persen, sektor industri menyerap 9,3 juta orang atau 11,8 persen, sektor perdagangan menyerap 12,2 juta orang atau 15,5 persen, sektor jasa menyerap 14,0 juta orang atau 17,8 persen sedang sisanya 4,3 juta orang atau 5,5 persen diserap oleh sektor pertambangan, listrik dan bangunan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan masih terdapat kesenjangan pemerataan distribusi antar sektor-sektor yang ada. Pada PJPT II diharapkan sektor industri dan jasa dapat

menjadi tumpuan dalam menunjang perekonomian Indonesia (Menaker, Media Korpri, 17 tahun 1994).

TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA

Berbagai pendapat tentang besarnya pengangguran yang dikemukakan oleh berbagai pihak menunjukkan betapa kompleksnya masalah pengangguran di Indonesia. Menurut SUPAS 1985 yang digolongkan penganggur adalah mereka yang mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan yang tidak terbatas pada jangka waktu satu minggu yang lalu saja tetapi bisa dilakukan beberapa minggu sebelum pencacahan asal masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Batasan tersebut mengandung kelemahan oleh karena tidak menjangkau mereka yang tergolong setengah menganggur atau penganggur terselubung. Penganggur terselubung adalah mereka yang bekerja dalam seminggu kurang dari jam kerja normal yaitu 35 jam seminggu atau mereka yang bekerja lebih dari jam kerja normal akan tetapi penghasilannya masih tergolong rendah. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan hasil SUPAS 1985 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Tingkat Pengangguran Terbuka di Desa dan Kota

Daerah	Sudah pernah bekerja		Belum pernah bekerja	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Kota	1,5	0,9	3,7	4,8
Desa	0,4	0,2	0,8	0,8
Ds+ Kt	0,6	0,4	1,5	1,7

Sumber: Tadjuddin Noer Effendi, 1993

Tingkat pengangguran di pedesaan menunjukkan angka yang lebih rendah, menurut

Turnham (1971) disebabkan struktur organisasi kegiatan kerja sektor pertanian dan usaha rumah tangga yang lebih berperan dari pada usaha-usaha non agraris. Mereka yang belum bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan dapat saja bekerja sementara membantu usaha keluarga walaupun dengan tingkat produktivitas rendah. Pada saat pencacahan mereka dicatat sebagai pekerja.

Ditinjau dari segi pendidikan tingkat pengangguran terkonsentrasi pada angkatan kerja berpendidikan SLTA D.1 dan D.2 atau angkatan kerja semi terdidik yang jumlahnya mencapai 10 persen. Pengangguran tingkat sarjana sebanyak 9,1 persen atau sebanyak 125.000 orang dan terus bertambah sekitar 113.000 orang setiap tahun. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 30 sampai 40 persen yang dapat diserap oleh pasar kerja.

Dilihat dari segi umur sebagian besar pengangguran didominasi oleh kelompok umur 15 sampai 34 tahun yakni mencapai jumlah 4,9 persen atau sebanyak 1,9 juta. Dari segi tempat tinggal pengangguran cukup tinggi terdapat di daerah perkotaan yakni mencapai jumlah 5,5 persen atau sebanyak 1,15 juta sedang di pedesaan sebanyak 1,5 persen atau 840.120 orang. Tingkat pengangguran global yakni termasuk mereka yang setengah penganggur yang berumur di atas 15 tahun sebanyak 38 persen atau sebanyak 28,95 juta orang (Depnaker, Kompas 7 Nopember 1994). Sebagai perbandingan dibawah ini disampaikan data pengangguran di desa dan di kota menurut SUPAS 1985 dalam tabel 5 dan tabel 6.

TABEL 5. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA-DESA MENURUT PENDIDIKAN, SUDAH PERNAH BEKERJA DAN BELUM PERNAH BEKERJA, 1985

Tingkat pendidikan	Sudah pernah Bekerja				Belum pernah bekerja			
	Kota		Desa		Kota		Desa	
	L	P	L	P	L	P	L	P
TS	0,7	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,05	0,1
TTSD	1,5	0,5	0,3	0,2	0,9	0,8	0,2	0,3
SD	1,6	1,1	0,4	0,2	2,0	2,3	0,5	0,8
SMTP UMUM	1,4	1,8	0,9	0,5	3,5	6,7	2,6	2,8
SMTP KEJUR	1,6	0,4	0,8	0,3	3,1	5,6	1,6	5,0
SMTA UMUM	1,5	1,3	1,9	2,3	10,8	20,6	10,3	28,6
SMTA KEJUR	1,7	1,7	0,8	0,9	7,8	11,4	4,8	7,8
SMTA KE ATAS	0,9	0,7	1,1	-	3,0	10,4	1,7	7,0

TABEL 6. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA-DESA MENURUT JENIS KELAMIN BAGI YANG SUDAH PERNAH BEKERJA DAN BELUM PERNAH BEKERJA

Gol. Umur	Sudah pernah Bekerja				Belum Pernah Bekerja			
	Kota		Desa		Kota		Desa	
	L	P	L	P	L	P	L	P
10-14	-	-	-	0,1	3,9	1,9	1,4	0,9
15-19	2,8	1,0	0,8	0,5	12,8	9,1	2,8	3,5
20-24	2,3	1,9	1,1	0,6	16,4	15,5	3,5	3,4
25-29	1,1	1,4	0,5	0,4	3,5	3,7	0,9	0,5
30-34	0,8	0,8	0,4	0,2	0,5	1,5	0,01	0,3
35-39	0,8	0,4	0,2	0,01	0,2	0,4	-	0,01
40-44	0,8	0,01	0,2	0,01	0,2	0,3	0,01	0,05
45-49	0,8	0,1	0,1	0,1	0,04	0,04	0,02	0,02
50-54	0,9	0,3	0,1	0,1	0,1	-	0,01	-
55 +	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,9	0,02	0,01

KONDISI PERBURUHAN di INDONESIA

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ketenaga-kerjaan di Indonesia antara lain pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

yang cukup tinggi, perpindahan penduduk antar wilayah yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota sebagai gerakan transformasi sektor tradisional ke sektor modern, problem kualitas tenaga kerja yang kurang memadai, tumbuhnya industri di perkotaan dan meningkatnya jumlah pekerja yang bekerja dalam hubungan kerja.

Pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,98 persen serta pertumbuhan angkatan kerja dari tahun ke tahun (81,3 juta tahun 1993 menjadi 92,3 juta pada tahun 1998 dengan angkatan kerja wanita 4,3 juta) semakin bertambah sulit jika dikaitkan dengan kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Struktur angkatan kerja kita masih didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah yakni sekolah dasar ke bawah. Pada akhir tahun 1980 angkatan kerja di Indonesia terbagi atas lulusan SD ke bawah sebesar 76,3 persen (56,4 juta); SLTP 9,2 persen (6,8 juta); SLTA 12,6 persen (9,3 juta) dan perguruan Tinggi 2,0 persen (1,5 juta). Sementara pertumbuhan ekonomi (industrialisasi) menuntut kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi terutama kesepadanan lulusan dengan tuntutan dunia kerja (Menaker, 1994). Kualitas tenaga kerja yang kurang memadai serta keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia mengakibatkan banyak tenaga kerja yang menganggur dan atau terpaksa bekerja pada sektor yang tidak sesuai dengan latar belakang tingkat pendidikan serta keahlian yang dimiliki dengan tingkat upah yang rendah.

KASUS KETENAGA-KERJAAN / PERBURUHAN

Sebagai akibat kesenjangan angkatan kerja dengan peluang kerja yang tersedia seperti dikemukakan di atas timbul berbagai kasus ketenagakerjaan/perburuhan seperti tenaga buruh anak-anak, masalah upah minimal, keamanan dan keselamatan kerja,

perlindungan hak-hak buruh, jaminan kesejahteraan sosial dan lain-lain.

Menurut Prisma (1989:5) diperkirakan sampai 60 persen dari 90 ribu pekerja di 900 buah pabrik di sekitar Tangerang adalah anak-anak dibawah umur 12 tahun. Mereka bekerja di industri garment, tekstil, elektronika, biskuit, makanan, keramik dan sepatu. Mereka tidak pernah menamatkan sekolahnya karena bagi perusahaan tidak membedakan antara yang tamat SD atau belum. Upah ditentukan berdasarkan pada kecepatan menyelesaikan pekerjaan.

Menurut hasil penelitian Effendi (1990), Tjandraningsih dan White (1991) di pedesaan anak-anak selain terlibat dalam bidang pertanian diantara mereka ada yang terlibat pada kegiatan perdagangan dan angkutan (bengkel sepeda motor atau kernet) dan menemukan banyak anak-anak dibawah umur 14 tahun sudah bekerja pada industri besar dan kecil. Pada umumnya mereka berasal dari keluarga buruh tani, petani berlahan sempit atau buruh pabrik. Kebanyakan dari mereka tidak bersekolah lagi dan terpaksa bekerja oleh karena kesulitan ekonomi (sulit membayar uang sekolah) dan mereka butuh pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga atau kebutuhannya sendiri. Mereka yang bekerja di pedesaan kadangkala tidak menerima upah tetap akan tetapi hanya diberi makan dan biaya hidup sekedarnya.

Jika mereka menerima upah, jumlahnya sangat rendah dengan kondisi kerja yang tidak memenuhi syarat, ada yang harus tidur di pasar menunggu dagangannya atau tidur di tempat kerja tanpa fasilitas apapun dan harus bekerja seminggu penuh dengan jam kerja yang panjang di atas jam kerja normal (Tadjuddin, 1993:62).

Berkaitan dengan tingkat upah menurut Menaker Abdul Latief menyatakan

bahwa pada akhir Pelita IV nilai Upah Minimum Regional (UMR) baru mencapai 45 persen dan naik menjadi 69 persen dari standar Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) pada akhir Pelita V. Keputusan pemerintah tanggal 27 dan 28 Desember 1994 menetapkan bulan Januari 1995. KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) yang dicanangkan pemerintah tidak hanya mencakup segi fisik semata akan tetapi memperhatikan kebutuhan non-fisik seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan penetapan baru tersebut UMR rata-rata mencapai 107 persen dari KFM dengan kenaikan bervariasi dari 10 persen terendah sampai 35 persen tertinggi. Seperti diketahui pemerintah akan menuntut pihak perusahaan yang tidak memenuhi UMR dan akan dijatuhi sanksi tegas. Upah pokok ditetapkan minimal 75 persen dari UMR tidak termasuk tunjangan yang bersifat perangsang dengan standar waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam per minggu (Menaker, Republika, 4 Januari 1995).

Keamanan dan keselamatan kerja pada beberapa perusahaan besar telah cukup mendapat perhatian dengan menyediakan berbagai peralatan yang menjamin keselamatan kerja buruh seperti alat pemadam kebakaran, alarm, masker, pakaian anti api, ambulance dan sebagainya. Akan tetapi pada perusahaan-perusahaan sedang dan kecil masalah keamanan serta keselamatan kerja masih kurang diperhatikan sehingga sering terjadi kecelakaan kerja yang berkaitan dengan kebakaran, sengatan aliran listrik, keracunan gas, kerusakan mesin dan gangguan kesehatan pada fisik pekerja.

Perlindungan hak-hak buruh dan sengketa perburuhan seringkali dilanggar. Ungkapan ketidakpuasan pekerja terhadap upah, kondisi kerja dan manajemen seringkali ditanggapi dengan kekerasan dari tindakan

pemindahan, penurunan jabatan, ancaman atau intimidasi, pemecatan bahkan dengan tindakan menghakimi sendiri seperti peristiwa Marsinah (Surabaya), Iis Sugiarti (Bandung) dan Pakpahan (Medan). Dibalik itu, diperkirakan masih banyak sejumlah kasus yang tidak muncul berkaitan dengan hak-hak pembantu rumah tangga, pelayan toko, hotel, tempat-tempat hiburan dan mereka yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan.

Perselisihan perburuhan, sekalipun sudah tersedia lembaga P4D (Panitia Penyelesaian Persengketaan Perburuhan) nampaknya para pemilik perusahaan (majikan) lebih suka menyelesaikan lewat konfrontasi langsung dengan pihak-pihak yang bersengketa tanpa lewat organisasi buruh atau lembaga arbitrage lainnya. Misalnya dalam masalah PHK sekalipun sering terjadi kesepakatan atau musyawarah berdasarkan kekeluargaan. Penyelesaian dengan cara-cara seperti itu tidak menyelesaikan masalah secara tuntas dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Masalah jaminan kesejahteraan sosial seperti jaminan kesehatan/pengobatan, kematian, kecelakaan kerja, kelahiran, tunjangan anak dan tunjangan kemahalan, tunjangan hari raya fasilitas peribadatan serta pensiun bagi sebagian besar perusahaan merupakan suatu beban. Oleh karena itu masih cukup terbatas jumlah perusahaan yang memperhatikan masalah kesejahteraan buruh sampai sejauh itu.

HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA

Jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja (perburuhan) semakin meningkat. Jumlah perusahaan meningkat dari 86.296 pada tahun 1986 menjadi 125.552 pada tahun 1990. Jumlah tenaga kerja yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja meningkat dari 4,6 juta pada tahun 1986 menjadi 5,0 juta pada tahun 1990.

Dengan peningkatan tersebut perlu diperhatikan masalah hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara pengusaha dan pekerja sehingga menciptakan ketenangan kerja dan berusaha, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan syarat-syarat kerja, kondisi kerja, lingkungan kerja jaminan sosial dan lain-lain yang apabila tidak ditangani secara baik dapat menimbulkan gangguan stabilitas.

Hubungan kerja yang harmonis dan dinamis seperti tersebut di atas telah dituangkan oleh pemerintah dalam suatu konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang memuat prinsip-prinsip hubungan industrial sebagai berikut:

1. Kerjasama antara pimpinan perusahaan dengan pekerja dalam hubungan kemitraan/kedudukan yang setara (partnership) dalam mencapai kemajuan perusahaan.
2. Bekerja tidak semata-mata mencari keuntungan material atau nafkah semata akan tetapi seklaigus merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan.
3. Pekerja bukan sekedar faktor produksi tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
4. Penyelesaian setiap perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha harus diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat dan gotong royong.
5. Keberhasilan perusahaan merupakan hasil usaha dan upaya kerjasama antara pekerja dengan pengusaha oleh karena itu harus dinikmati secara adil sesuai dengan pengorbanan dan tanggung jawab masing-masing.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pertumbuhan penduduk Indonesia pada dua dekade yang akan datang masih akan terus bertambah yang akan membawa implikasi lebih lanjut terhadap perlunya ketersediaan lapangan kerja baik bagi laki-laki dan lebih-lebih tenaga kerja wanita yang pada dua dekade yang akan datang semakin meningkat jumlahnya. Jumlah pengangguran yang juga semakin meningkat sebagai akibat disparitas ketersediaan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja dan oleh karena itu kebijaksanaan industrialisasi harus ditingkatkan terutama industri yang mampu menyerap tenaga kerja (labor intensif).
2. Sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa oleh karena tidak sangat bergantung pada tingkat pendidikan (ijazah) jenis kelamin maupun umur. Di sisi lain sektor pertambangan dan galian perlu terus dikembangkan oleh karena secara relatif menyerap banyak tenaga kerja setelah sektor jasa. Sektor pertanian sekalipun mampu menyerap kelebihan tenaga kerja akan tetapi merupakan tempat bagi penganggur terselubung dan kurang produktif.
3. Kualitas pendidikan tenaga kerja yang tidak memenuhi kebutuhan tenaga kerja (mismatch) menimbulkan masalah pengangguran baik yang sifatnya terbuka maupun tersembunyi. Akibatnya banyak diantara mereka yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan atau keahliannya dan atau terpaksa bekerja dengan upah yang rendah dari pada menganggur. Syarat-syarat serta kondisi kerja kurang mendapat perhatian dan seringkali menimbulkan tindakan pelanggaran hak-hak pekerja, kesewenang-wenangan dan tindakan-tindakan lain yang

kurang manusiawi. Kondisi perburuhan ketenaga-kerjaan seperti ini jelas tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Hubungan industrial Pancasila merupakan suatu alternatif dimasa mendatang agar tercipta suasana hubungan kerja yang dinamis dan harmonis antara pengusaha dengan pekerja.

REFERENSI

- Abdul Latief, *Sapta Karya Tama Pelita VI Depnaker*, Media Korpri DIY, No.17 Tahun 1994.
- , *Upah Pekerja Dinaikkan Rata-rata 22,36 persen*, *Republika*, 4 Januari 1994.
- Lukman Sutrisno, *Dinamika Sosial Pemuda Dekade 90-an, dilemma Pendidikan dan ketenaga-kerjaan*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Masfoeri, *Pengangguran Terdidik di Perkotaan*, *Kompas*, 7 November 1994.
- Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.
- Tri Sucipto dan Tukiran, *Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 1990-2050*, PPK UGM, Yogyakarta, 1992. ■